

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan kondisi kemiskinan suatu negara merupakan suatu permasalahan yang selalu menjadi pembahasan. Kemiskinan juga disebut masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, hingga kondisi lingkungan. Kemiskinan juga merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Oleh sebab itu, dengan meningkatnya kemiskinan maka dapat disimpulkan menurun pula kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Kemiskinan menjadi masalah klasik yang besar dan mendasar bagi negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia. Negara Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Kemiskinan dapat dijadikan sebagai ukuran baik buruknya perekonomian suatu negara dalam mencapai pembangunan nasional (Munandar et al., 2020).

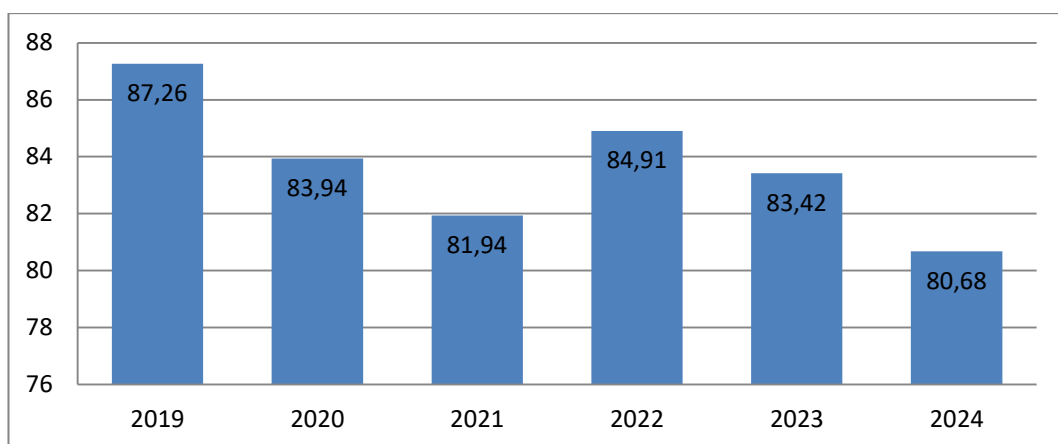
Dalam rangka untuk mencapai pembangunan nasional maka dituntut untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara umum. Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya (BPS, 2019).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan dalam perekonomian suatu daerah. Tingginya kemiskinan menjadikan pemerintah berupaya untuk menekan dan bahkan berusaha untuk mengentaskan kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan tingkat kemampuan pengeluaran masyarakat dibawah rata-rata. Kemiskinan juga menunjukkan sebuah kondisi yang berada dibawah garis standar minimum yang sudah ditetapkan, baik untuk kebutuhan makanan dan kebutuhan minuman (Budhijana, 2019).

Pratiwi (2019) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki dampak negatif yang menimbulkan banyak masalah sosial, dan kemiskinan juga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Kemiskinan mencegah pengeluaran untuk pembangunan ekonomi yang telah tumbuh lebih besar selama bertahun-tahun. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk menaikkan taraf hidup suatu negara, biasanya diukur dengan pendapatan riil per kapita, kecepatan produksi. Kondisi tertentu ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan manusia, teknologi, kondisi pasar dan konteks kehidupan ekonomi.

Secara umum tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 sudah terjadi penurunan. Penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 810 ribu penduduk dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2018. Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk, penduduk miskin hingga Maret 2019 tercatat 9,41 persen atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya 9,82 persen, (Badan Pusat Statistik, 2020).

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), Aceh memiliki kekayaan alam besar dan alokasi dana khusus yang dapat mengatasi kemiskinan, namun pada tahun 2019 Aceh malah menduduki peringkat tertinggi angka kemiskinannya. Persentase penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Aceh terus berfluktuasi yaitu sebesar 15,68 persen. Berikut merupakan kemiskian di Aceh selama lima enam tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

**Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Aceh Tahun 2019-2024**

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2024. Pada tahun 2019 Provinsi Aceh mengalami tingkat kemiskinan yang tertinggi. Menurut BPS (2020) hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan dan terbatasnya akses terhadap infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, dan air bersih, sehingga menghambat mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Pratiwi (2019) untuk dapat menurunkan angka kemiskinan, diperlukan strategi yang mencakup keseluruhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta perluasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan. Selain itu, penting untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat

miskin, meningkatkan pendapatan mereka, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi melalui dana otonomi khusus maupun lainnya.

Menurut Pratiwi (2019) faktor yang dapat menurunkan angka kemiskinan yaitu dana otonomi khusus, dimana peningkatan otonomi khusus dapat menjadi bagian dari strategi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, dimana dana otonomi khusus dapat memberikan daerah yang bersangkutan lebih banyak masalah dan kontrol dalam mengelola sumber daya dan merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal untuk mengatasi kemiskinan.

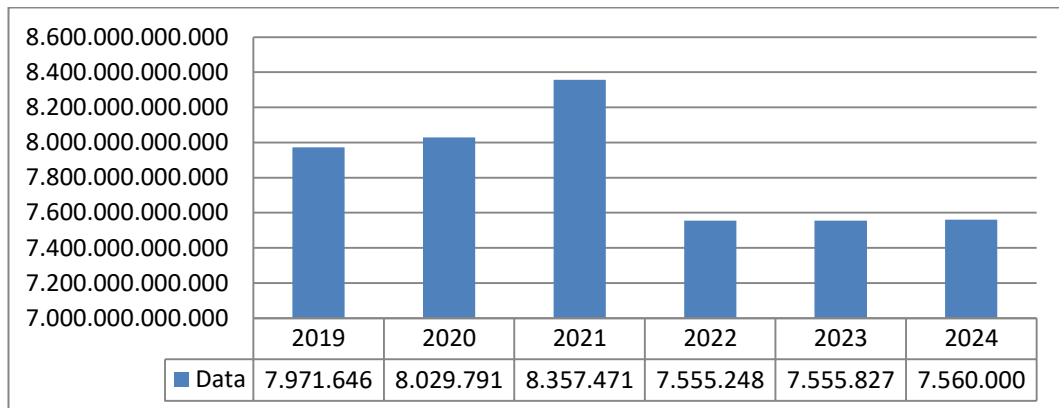
Sehubungan dengan itu menurut Budhijana (2019) otonomi Khusus yang diberlakukan di suatu daerah dapat dikategorikan sebagai desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris adalah desentralisasi luas namun tidak harus seragam untuk wilayah negara mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Daerah di Indonesia yang diberi kewenangan dengan Otonomi Khusus adalah Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan Yogyakarta.

Otonomi Khusus Provinsi Aceh merupakan suatu wewenang yang ditujukan oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Aceh untuk mengatur dan mengurus wilayahnya dengan roda pemerintahannya tanpa terlepas dari pengawasan Pemerintah Pusat. Pemberian Otonomi Khusus kepada Provinsi Aceh karena kekhasan karakter masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam, selain itu juga wujud penghargaan negara terhadap dedikasi dan perjuangan yang sangat luar biasa dari Aceh selama perang kemerdekaan. Perlakuan khusus ini

menjadi keuntungan bagi Provinsi Aceh untuk mengembangkan pemerintahannya sendiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Otonomi khusus Aceh dipandang dapat mengurangi kemiskinan dengan lebih cepat apabila didorong oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Otonomi khusus di Aceh akan meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya karena pemerintah daerah lebih dekat dengan penduduk daerahnya daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah diharapkan memiliki informasi yang akurat dan bisa menyelesaikan persoalan dengan lebih cepat khususnya mengenai kemiskinan.

Landasan hukum Otonomi Khusus Aceh adalah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 183 ayat (1) undang-undang itu mengamanatkan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020). Pada penerapan status Otonomi Khusus ini, Aceh berhak menerima Dana Otonomi Khusus selama 20 tahun yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Sejak dianggarkan pertama kali di tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 total alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh sebesar 95,93 triliun rupiah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2025

**Gambar 1.2 Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun 2019-2024**

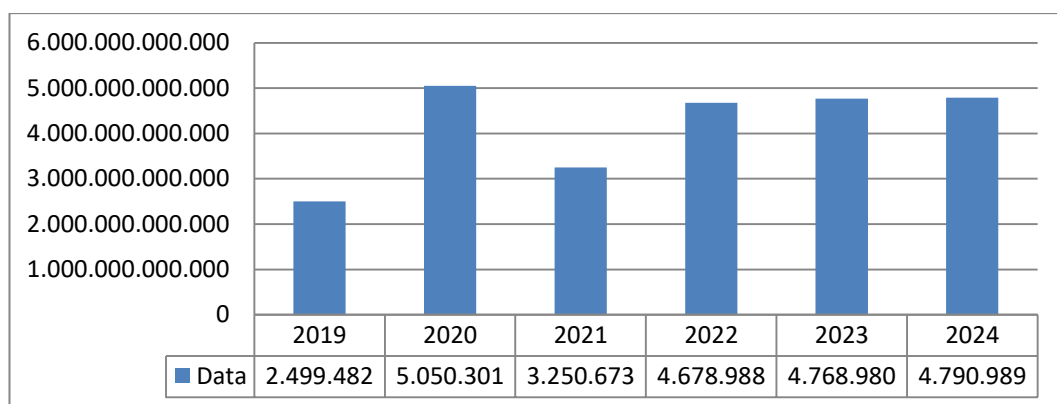
Berdasarkan Gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa Dana Otonomi Khusus yang diterima merupakan jumlah yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi Aceh. Apalagi pada tahun 2021 Aceh memperoleh dana otonomi khusus terbesar, hal ini dikarenakan pemerintah pusat mengalokasikan dana tambahan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan setelah Aceh mengalami masa sulit dalam penyelesaian konflik Aceh dan upaya untuk mengatasi kesenjangan antara Aceh dengan daerah lain di Indonesia dan juga Provinsi Aceh dalam pemulihan setelah adanya covid-19. Kemudian pada tahun 2022 karena adanya pengalokasian dana yang tidak tepat sasaran, dan kurangnya pengelolaan dana yang efektif. Dimana menurut Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Aceh (2024) pada tahun 2022 terdapat hambatan dalam pengelolaan dana Otsus, termasuk pembagian anggaran, ketergantungan pada transfer dana, dan transparansi keuangan.

Besarnya Dana Otonomi Khusus yang diberikan selama ini tidak membuat Provinsi Aceh jauh lebih makmur dibandingkan daerah lain. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Dengan menyerahkan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerahnya. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan masih mengalami kendala di daerah sehingga perlu dievaluasi agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal berupa dana otonomi khusus mampu mengurangi kemiskinan di daerahnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Amar et al., (2023) bahwa penggunaan dana otonomi khusus akan mencapai kesejahteraan jika terpenuhi nya aspek yang mempengaruhinya seperti regulasi yang baik dalam melaksanakan alokasi dana otonomi khusus itu sendiri, kemudian transparansi dana dalam pelaksanaan kegiatan baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur. Artinya penggunaan dana otonomi khusus akan berjalan dengan cukup baik dan mampu menurunkan kemiskinan jika dana yang digunakan sesuai dengan ketentuannya.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah dana desa. Menurut Lili (2019) dana desa merupakan dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai guna mendanai segala proses memberdayakan semua masyarakat pedesaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pembangunan desa.

Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Menurut Lestari (2017) peningkatan kualitas dan perluasan ruang lingkup dari pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi sumber daya manusia sumber daya manusia yang berkualitas dan pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Berikut merupakan dana desa di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024.



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2025

**Gambar 1.3 Dana Desa Provinsi Aceh Tahun 2019-2024**

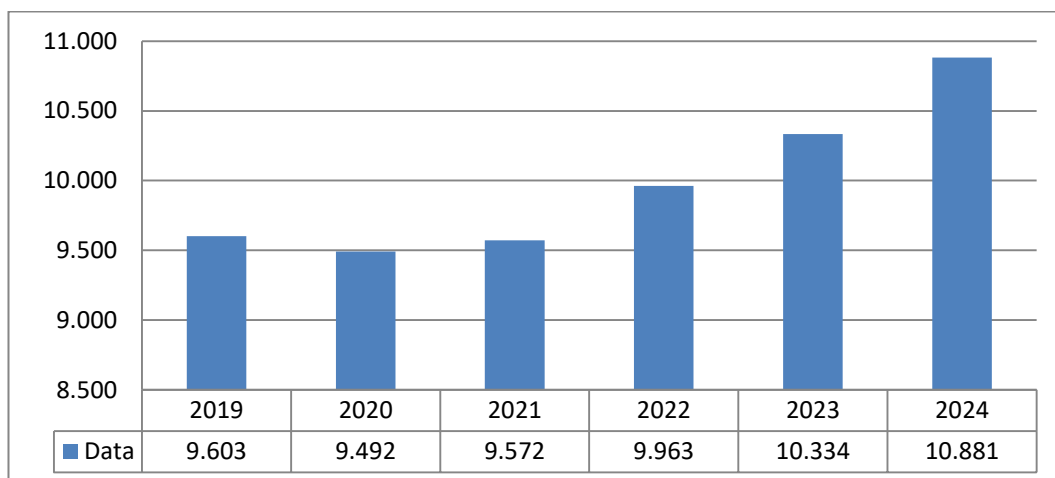
Berdasarkan gambar di atas menjelaskan bahwa, dana desa terbesar yaitu terdapat pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan penggunaan dana desa diberikan sebagai santunan bagi masyarakat fakir dan miskin yang terdampak pembatasan kegiatan ekonomi karena pandemi Covid-19. Tingginya dana desa di Provinsi Aceh tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan jumlah desa yang menerima ADD, peningkatan nilai ADD per desa, dan mungkin juga adanya kebijakan khusus yang diterapkan oleh pemerintah pusat atau daerah terkait adanya covid-19 dan pemberian bantuan pada fakir miskin yang terdampak pandemi. Kemudian pada tahun selanjutnya dana desa juga mulai meningkat setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Lestari (2017)



dimana semakin meningkat dana desa maka semakin rendah tingkat kemiskinan. Fenomena yang terjadi dalam penelitian yaitu Provinsi Aceh yang dengan jumlah dana desa terbesar juga justru memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Hasil penelitian Sigit dan Kokasih (2020), menyimpulkan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian Suhu dan Utama (2019), Putra (2018) juga menyatakan bahwa peningkatan dana desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Artinya ada indikasi bahwa dana desa tidak dapat menurunkan jumlah kemiskinan secara permanen.

Faktor lain yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dalam menurunkan kemiskinan adalah tingkat pendidikan masyarakat. Menurut Palto (2020) pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik jasmani maupun rohani, agar mereka dapat mencapai kedewasaan dan mampu menjalankan tugas hidupnya secara mandiri. Proses ini meliputi bimbingan, pengajaran, dan berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk membentuk karakter, kecerdasan, dan keterampilan.

Zartika (2019) mengemukakan bahwa kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor rendahnya taraf pendidikan, sehingga mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan sulit bersaing di dunia kerja yang rata-rata mengutamakan tingkat pendidikan. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu daerah. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja disebabkan biaya pendidikan yang tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

**Gambar 1.4 Biaya Pengeluaran Pendidikan di Provinsi Aceh Tahun 2019-2024**

Gambar di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2021-2024 biaya pendidikan di Provinsi Aceh terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya operasional sekolah, dan peningkatan kualitas fasilitas serta infrastruktur. Selain itu pengawasan pemerintah yang kurang maksimal menyebabkan terjadinya kenaikan biaya. Namun, pada tahun 2020 biaya pendidikan mengalami penurunan dikarenakan dampak dari pandemic Covid-19 yang menyebabkan sekolah diliburkan dan belajar dirumah. Pendidikan yang maksimal seharusnya dirasakan oleh masyarakat Aceh. artinya masyarakat minimal harus menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Berdasarkan data Badan Pusast Statistik Aceh (2023) terdapat 1,75% penduduk Aceh yang masih buta huruf, artinya masih ada penduduk yang belum bisa membaca dan menulis huruf latin. Minimnya minat belajar masyarakat Provinsi Aceh disebabkan oleh faktor biaya dan kebutuhan pendidikan yang tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat.

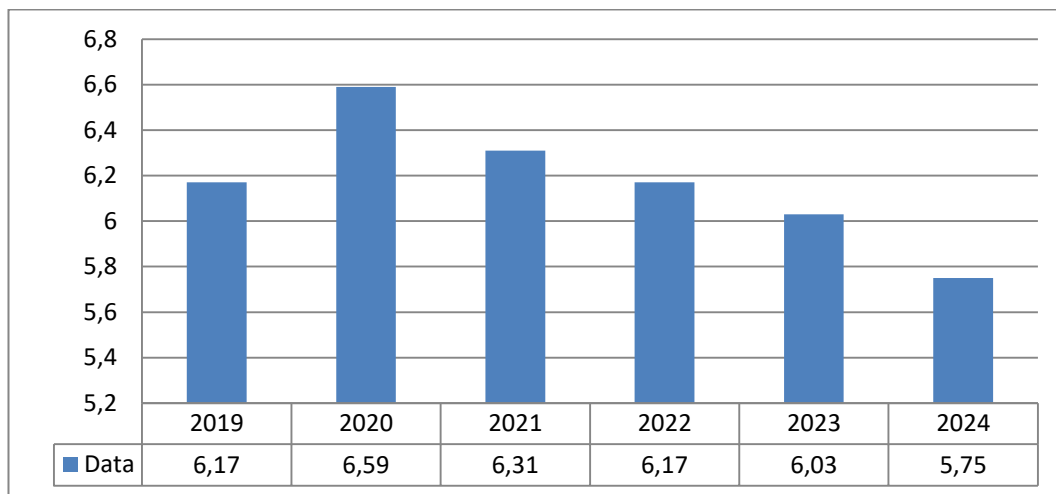
Pendidikan dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangat besar. Menurut Afzal (2021), pendidikan memiliki pengaruh dan manfaat yang besar terhadap pengurangan kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya investasi dalam bidang pendidikan, selain itu peningkatan kualitas pendidikan dan akses yang mudah dalam memperoleh pendidikan. Menurut Anderson (2012), tingkat pendidikan yang memadai akan memperbesar bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Terdapat hubungan yang kuat antara pendidikan dan kemiskinan, dimana melalui pendidikan dapat mengurangi kemiskinan, sedangkan kemiskinan dapat membatasi akses terhadap pendidikan (Pokharel, 2015). Disisi lain rendahnya tingkat pendidikan seseorang menyebabkan meningkatnya kemiskinan, karena orang yang berpendidikan rendah kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak (Sukidjo, 2019; Persico, 2020; Sartika et al., 2019).

Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu komponen penyebab terjadinya kemiskinan. Pembangunan bidang pendidikan adalah aspek penting yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Melalui investasi bidang pendidikan maka akan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan akan mendorong meningkatnya produktivitas seseorang, sehingga akan meningkatkan pendapatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan dengan mengurangi jumlah pengangguran.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran terbuka. Pengangguran merupakan masalah yang sulit dihindari oleh setiap negara. Pada kenyataannya semua negara didunia pasti mengalami masalah pengangguran dan tentunya dengan tingkat permasalahan yang berbeda-beda di setiap negara. Pengangguran sering menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran maka produktivitas dan pendapatan masyarakat akan menurun sehingga dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Pengangguran ialah persoalan sangat buruk dampaknya pada perekonomian serta masyarakat. Pengangguran yang tinggi memiliki efek buruk baik pada perekonomian, seseorang maupun rakyat, Sukirno dalam kutipan (Urmila et al., 2022).

Provinsi Aceh mengalami permasalahan yang cukup kompleks dalam hal mengatasi pengangguran yang ada di Provinsi ini. Bahkan Provinsi ini dinobatkan sebagai salah satu Provinsi termiskin dan mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi di bagian pulau Sumatera. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi masalah serius karena dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memahami pengaruh faktor-faktor seperti upah minimum, Tingkat Partisipasi angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dalam runtun tahun 2019 sampai tahun 2024 menunjukkan keadaan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh yang mengalami fluktuasi. Data perkembangan tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada Gambar 1.5 berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025

**Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh Tahun 2019-2024**

Berdasarkan Gambar di atas menjelaskan bahwa, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2021-2024 tingkat pengangguran mengalami penurunan. Yang artinya jumlah pengangguran di tahun 2021-2024 mulai berkurang, dimana banyak masyarakat yang menganggur mulai mendapatkan pekerjaan. Hal ini dikarenakan banyak nya jumlah lapangan kerja yang mulai ada di Provinsi Aceh. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Tumilaar et al., (2022) dimana menurutnya tingkat pengangguran menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Alasannya jelas karena tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, demikian juga sebaliknya.

Berdasarkan data dan permasalahan mengenai dana otonomi khusus (otsus) di beberapa daerah seperti Aceh, terbukti mampu memberikan kontribusi positif terhadap menurunnya tingkat kemiskinan. Menurut Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (2025) menyatakan bahwa pemerintah Aceh mengklaim dana

otsus mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh selama periode tertentu. Namun, dalam penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan menyatakan bahwa otsus berpengaruh negatif terhadap kemiskinan atau belum mampu memberikan kontribusi yang besar dalam penurunan kemiskinan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kadafi & Murtala (2020) menunjukkan bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Febriaty (2021) menunjukkan bahwa peningkatan dana otonomi khusus berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin. Dalam penelitian ini variabel dana otonomi khusus menjadi faktor yang sangat penting untuk diteliti untuk mengetahui apakah dana otonomi khusus mempengaruhi kemiskinan atau tidak.

Berdasarkan data mengenai pendidikan dan tingkat pengangguran, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (2025) menyatakan bahwa pendidikan dan kemiskinan terbuka memang memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Pendidikan yang lebih tinggi dan kemiskinan yang rendah cenderung memberikan kontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Bahkan sudah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pendidikan dan kemiskinan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Agustina, et al., (2018) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Aulia, et al., (2019) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam penelitian ini variabel tingkat pendidikan

merupakan faktor yang sangat penting untuk diteliti untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan atau tidak. Hal yang penting untuk diperhatikan ialah sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah bisa memberikan pengaruh serta dampak pada penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan setiap tahunnya. Untuk menurunkan kemiskinan suatu daerah maka perlu dikeluarkannya kebijakan pemerintah daerah Aceh melalui implementasi dana otonomi khusus dan upaya peningkatan tingkat pendidikan. Kebijakan dana otonomi khusus memiliki pengaruh terhadap kemiskinan dan begitu pula dengan adanya peningkatan pendidikan memiliki dampak terhadap pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Dana Desa, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?

3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
5. Bagaimana pengaruh dana otonomi khusus, dana desa, pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dana otonomi khusus terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Mengetahui pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
3. Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
4. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
5. Mengetahui pengaruh dana otonomi khusus, dana desa, pendidikan dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah tentunya dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti berikut ini:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta dapat menambah ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini bisa bermanfaat untuk jadi pembandingan dengan penelitian yang hampir sama selanjutnya.
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran akademik.
4. Penelitian ini bisa menjadi salah satu sumber untuk dapat mengetahui pengaruh dana otonomi khusus, dana desa, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.
2. Bagi pelajar, untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh dana otonomi khusus, dana desa, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.
3. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam menganalisa mengenai pengaruh dana otonomi khusus, dana desa, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.